

Pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas terhadap peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada DPRD kabupaten dan kota Magelang)

Heni Sofi^{1*}, Muji Mranani¹, Yulinda Devi Pramita¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: henisofiii@gmail.com

DOI: 10.31603/bacr.7761

Abstract

The role of DPRD members in supervising regional finances is one of the important aspects in the implementation of regional autonomy and plays a very large role in controlling economic, efficient, effective and accountable regional financial policies. DPRD have different educational and occupational backgrounds before becoming DPRD members, so when they are elected as DPRD members, this limited knowledge and experience will become an obstacle in carrying out their supervisory function. This requires a relatively longer time, weak oversight and accountability functions are factors that affect the performance of DPRD members in monitoring regional finances, which are influenced by the system personally. This study aims to empirically test and analyze the influence of personal background, political background, budget knowledge and accountability on the role of DPRD members in regional financial supervision. The research population is members of the Regency and City Legislatures of Magelang City. Based on the sampling method with non-probability sampling with saturated sample types, a sample of 72 samples of members of the Magelang Regency and City DPRD was obtained. The results showed that political background and accountability had a positive effect on the role of DPRD members in regional financial supervision while personal background and budget knowledge did not affect the role of DPRD members in regional financial supervision. The role of DPRD in carrying out the supervisory function must be optimized, This is done to identify the allocation of funds in the local government budget with the hope that there will be no deviations during budget execution and produce good performance in regional financial supervision.

Keywords: *Personal Background; Political Background; budget knowledge; The role of DPRD members, regional financial supervision*

Abstrak

Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sangat besar perannya untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. DPRD mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berbeda sebelum menjadi anggota DPRD, sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota DPRD, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih, lemahnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem secara pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten dan Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *non probability* sampling dengan jenis sampel jenuh diperoleh sampel sebanyak 72 sampel anggota DPRD Kabupaten dan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political background* dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan *personal background* dan pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran dan menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Personal Background*, *Political Background*, Pengetahuan Anggaran, Akuntabilitas, Peran Anggota DPRD, Pengawasan Keuangan Daerah.

1. Pendahuluan

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebagai pengontrol arah kebijakan keuangan daerah. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkewajiban dan berwenang untuk mengawasi anggaran daerah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun (2015) tentang Pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing secara maksimal. Permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota DPRD perlu dilakukan untuk menyeimbangkan dengan kinerja pemerintah dalam hal penyusunan APBD dan mengontrol realisasi APBD, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap pemberian kekuasaan dan wewenang yang luas terhadap pemerintah maka perlu dilakukan pengawasan serta kontrol yang kuat sehingga dalam pengelolaannya dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis (Pramita & Andriyani, 2010).

Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp26,83 triliun pada semester 1 2021 meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun. Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk (Annur, 2021). Kasus kecurangan akuntansi akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia yang tak jarang dilakukan oleh para pejabat publik yang dengan sengaja meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah lebih dituntut untuk menciptakan akuntabilitas.

Data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa tengah tahun 2022 kasus korupsi Jawa Tengah sebanyak 34 kasus dari tahun 2015-2021 yang menunjukkan dari 35 Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah, hanya ada 2 kabupaten yang dinyatakan bersih dari korupsi, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Blora. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang dan Kota Magelang termasuk diantara kabupaten atau kota yang belum bebas dari tindakan korupsi. Kasus korupsi kabupaten dan kota Magelang terungkap korupsi lebih banyak dibandingkan diwilayah Kedu lainnya di Kabupaten Magelang sebanyak 6 kasus dan Kota Magelang sebanyak 5 kasus.

Kasus korupsi yang terjadi di Kota Magelang diantaranya tahun 2015 PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Kota Magelang yang menyalahgunakan wewenangnya menyangkut pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), korupsi dilakukan dengan memproses sendiri pajak yang dibayarkan wajib pajak (WP) tanpa melalui manual pendapatan daerah (Mapada) senilai Rp601.070.250, Tahun 2016 Pemkot Magelang kasus penghilangan catatan dengan tidak tercatatnya aset tetap di neraca dan tidak diketahui keberadaannya yang terdiri dari 19 bidang tanah Rp1.834.164.000, gedung dan bangunan Rp1.372.733.230, jaringan jalan dan irigasi Rp8.415.668.133. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Magelang diantaranya tahun 2016 terindikasi adanya kasus korupsi pengadaan pupuk dan bibit terkait BPBD Kabupaten Magelang sebesar Rp869 miliar (bpk.go.id, 2017), pada tahun 2019 Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magelang kasus korupsi penjualan aset-aset sejak tahun 2017-2019 menjual 100 unit lebih kendaraan dinas senilai Rp2,06 miliar, dan tahun 2020 dua pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang terjerat kasus korupsi dana operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil sampah kerugian keuangan negara Rp700 juta lebih (Jateng.bpk.go.id, 2021).

Adanya penyelewengan-penyelewengan dana terjadi karena kurangnya partisipasi anggota DPRD dalam pengawasan keseluruhan proses keuangan daerah, dalam perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut hal ini para DPRD yang harus ditelaah. Lemahnya DPRD dan fungsi pengawasan kinerja legislatif dalam pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya atau pun individu sebagai pelaku dalam hal ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota DPRD yang memiliki latar belakang pribadi yang berbeda

baik dari segi usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan maupun pengalaman dalam bidang politik, pengetahuan anggaran selaku pengawas pelaksanaan keuangan daerah. Latar belakang individu anggota DPRD terdiri dari *personal background*, *political background*, pemahaman anggota DPRD tentang anggaran dan budaya politik (Setiawan & Suryandari, 2019).

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu masalah keuangan dan APBD. Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kenyataannya sebagian besar anggota DPRD didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota DPRD, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih, lemahnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif, pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh sistem secara pribadi.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Ronsumbre *et al.*, (2019) yang meneliti tentang pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah anggota pada DPRD Provinsi Papua Barat, dengan persamaan menggunakan semua variabel yang ada. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *personal background* dan pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan *political background* berpengaruh negatif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **pertama**, adanya penambahan variabel akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah penambahan variabel diambil dari penelitian Arianti (2017), Karubaba (2017), dan Hapsari (2018), alasan penambahan variabel akuntabilitas karena akuntabilitas DPRD mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri anggota DPRD seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dalam mengawasi dan mengontrol keuangan daerah sehingga dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang berhasil, baik dan mencegah adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Hapsari (2018) akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD sangat berarti dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah, agar anggota DPRD akan aktif dalam menerima laporan pertanggungjawaban dan menelaah keberhasilan atau kegagalan serta seberapa efektif dan efisien penggunaan dan penyerapan anggaran.

Perbedaan **kedua**, penelitian ini mengambil lokasi di DPRD Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Alasan penelitian mengambil lokasi di DPRD Kabupaten dan Kota Magelang karena terdapat temuan kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara (kpk.go.id, 2022). Permasalahan dan kasus terjadi karena dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif (Tondang, R. & Robin, 2022).

2. Metode

2.1. Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jawaban diperoleh dari responden atas beberapa daftar pernyataan dengan kuesioner tentang *personal background*, *political background*, pengetahuan dan akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Teknik skala pengambilan kuesioner dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala *likert* dengan 5 jawaban sebagai pilihannya yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS)

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota Magelang. Jenis penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dengan jenis sampel jenuh untuk pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) metode sampling jenuh yaitu pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 orang anggota DPRD terdiri dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Magelang (magelangkab.go.id, 2022) dan 25 Orang anggota DPRD kota Magelang (magelangkota.bps.go.id, 2022)

2.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 1 menjelaskan definisi dan indikator pengukuran variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator
1.	Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (PKD)	Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD yang berarti digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD (Arianti, 2017)	Instrumen penelitian mengacu penelitian dari (Ronsumbre <i>et al.</i> , 2019) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan indikator : 1. Anggota DPRD terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan APBD 2. Anggota DPRD terlibat dalam pengesahan APBD 3. Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun, 4. Anggota DPRD terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator
			Anggota DPRD mengusut dan menindak lanjuti apabila terjadi kejanggalan dalam LKPJ APBD
2.	<i>Personal background</i> (PEB)	<i>Personal background</i> merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. (Setiawan & Suryandari, 2019)	Instrumen penelitian mengacu penelitian dari (Mandacan <i>et al.</i> , 2018) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kelamin 2. Usia 3. Tingkat Pendidikan 4. Latar belakang pekerjaan 5. Pengalaman Pekerjaan
3.	<i>Political background</i> (POB)	<i>Political background</i> merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang yang telah berkecimpung dalam dunia politik (Ronsumbre <i>et al.</i> , 2019)	Instrumen penelitian mengacu penelitian dari (Arianti, 2017) yang terdiri dari 9 pernyataan dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman politik, 2. Pengalaman di DPRD 3. Asal partai politik 4. Jabatan di DPR
4.	Pengetahuan Anggaran (PEA)	Pengetahuan anggaran diartikan sebagai pengetahuan dewan tentang mekanisme perumusan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dan pengetahuan dewan tentang undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan (Karubaba, 2017)	Instrumen penelitian mengacu penelitian dari (Ronsumbre <i>et al.</i> , 2019) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dan memahami APBD 2. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD 3. Kebijakan Umum APBD 4. Mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan kegiatan

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator
5.	Akuntabilitas (AKB)	Akuntabilitas merupakan salah satu alat kontrol yang muncul sebagai konsekuensi logis antara pemerintah daerah dan anggota dewan (Hapsari, 2018)	Instrumen penelitian mengacu penelitian dari (Hapsari, 2018) yang terdiri dari 7 pernyataan dengan indikator : 1. Standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LKPJ 2. LKPJ sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan tugas 3. Prinsip penyusunan LKPJ 4. LKPJ dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik.

2.4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi linear berganda. Pengujian validitas menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan kriteria instrumen dikatakan valid jika nilai *cross loading* > 0,5. Untuk pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan kriteria instrumen dikatakan reliabel apabila nilai CA > 0,7. Pengujian selanjutnya adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2) dengan melihat nilai *adjusted r square*, pengujian ketepatan model dengan uji f dan uji t, dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Sampel Penelitian Kembali

Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden yang dituju. Adapun jumlah kuesioner penelitian yang didistribusikan dan yang kembali tersaji pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Jumlah Kuesioner Penelitian

No	Tempat Penelitian	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	DPRD Kabupaten Magelang	50	48
2	DPRD Kota Magelang	25	24
	Jumlah	75	72

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada di **Tabel 3**.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Standar Deviasi
PKD	72	4	5	4,57	0,499
PEB	72	3	5	4,29	0,542
POB	72	3	5	4,31	0,521
PEA	72	4	5	4,58	0,496
AKB	72	4	5	4,54	0,502

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.3. Uji Kualitas Data

3.2.1. Pengujian Validitas

Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai KMO dan *Bartlett's Test* > 0,5 dan suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pernyataan dengan jumlah skor seluruh pernyataan yang ditunjukkan dengan nilai *cross loading* > 0,5. Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada **Tabel 4** dan **Tabel 5**.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO and Bartlett's Test	Keterangan
PKD	0,790	Syarat Valid
PEB	0,823	Syarat Valid
POB	0,839	Syarat Valid
PEA	0,824	Syarat Valid
AKB	0,746	Syarat Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 5. Cross Loading

ITEM	PKD	PEB	POB	PEA	AKB
PKD 3	0,621				
PKD 5	0,733				
PKD 6	0,753				
PKD 7	0,819				
PKD 8	0,823				
PKD 9	0,826				
PKD 10	0,802				
PEB 2		0,575			
PEB 3		0,865			
PEB 4		0,887			
PEB 5		0,840			
PEB 6		0,885			
PEB 7		0,896			
PEB 8		0,842			
PEB 9		0,763			
PEB 10		0,759			

ITEM	PKD	PEB	POB	PEA	AKB
POB 1			0.866		
POB 3			0.909		
POB 5			0.916		
POB 7			0.881		
POB 9			0.813		
PEA 2				0.750	
PEA 4				0,877	
PEA 6				0,912	
PEA 8				0,809	
PEA 10				0,738	
AKB 1					0,797
AKB 2					0,786
AKB 3					0,785
AKB 4					0,765
AKB 5					0,744
AKB 6					0,726
AKB 7					0,701

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil *cross loading* pada [Tabel 4](#) dan [Tabel 5](#) menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan *cross loading* > 0,5 adalah valid. Namun terdapat 13 pernyataan yang tidak valid, yaitu PKD 1, PKD 2, PKD 4, PEB 1, POB 2, POB 4, POB 6, POB 8, PEA 1, PEA 3, PEA 5, PEA 7, dan PEA 9. Uji validitas pertama dilakukan dengan cara memasukkan semua item pernyataan yang ada pada semua variabel. Kemudian dilakukan uji validitas yang kedua dengan cara memasukkan item pernyataan yang valid sesuai uji validitas yang pertama, sehingga uji validitas yang ke kedua adalah valid untuk semua pernyataannya. Pernyataan itu tidak valid sebesar 28% karena memiliki nilai *cross loading* < 0,05, sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

3.2.2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil dari pengujian untuk semua variabel nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Hasil tersebut dapat dilihat pada [Tabel 6](#).

Tabel 6. Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
PKD	0,874	Reliabel
PEB	0,935	Reliabel
POB	0,924	Reliabel
PEA	0,862	Reliabel
AKB	0,876	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.2.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. **Tabel 7** menunjukkan hasil analisis nilai koefisien regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,469	5,976		1,752	0,084
PEB	0,028	0,081	0,041	0,350	0,728
P0B	0,465	0,151	0,333	3,059	0,003
PEA	0,095	0,149	0,068	0,634	0,528
AKB	0,373	0,141	0,305	2,643	0,010

Sumber Data primer yang diolah, 2022

3.4. Pengujian Hipotesis

3.4.1. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil pengujian *R Square* pada **Tabel 8** besarnya Adjusted R Square adalah 0,210. Hal ini berarti bahwa variabel *personal background*, *political background*, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas mampu menjelaskan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebesar 21%, sedangkan sisanya 79% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,505	0,255	0,210	2,867

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.4.2. Uji f

Berdasarkan hasil pengujian uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 5,720 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jumlah $n = 72$ dan $k = 5$ maka $df_1 = 4 (k - 1)$ dan $df_2 = 67 (n - k)$ serta didapat Ftabel sebesar 2,51. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan pada penelitian ini layak atau *fit*. Hasil dari uji f terlihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig.
Regression	188,089	4	47,022	5,720	0,001
Residual	550,786	67	8,221		
Total	738,875	71			

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.4.3. Uji t

Pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi masing-masing variabel independen menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Jumlah responden 72 maka derajat

kebebasannya $df = n - 1$ yaitu 1, sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,993. Hasil uji t ditunjukkan pada [Tabel 10](#).

Tabel 10. Uji t

	B	T hitung	Sig.	T tabel	Keterangan
PEB	0,028	0,350	0,728	1,993	H1 tidak diterima
POB	0,465	3,059	0,003	1,993	H2 diterima
PEA	0,095	0,634	0,528	1,993	H3 tidak diterima
AKB	0,373	2,643	0,010	1,993	H4 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

3.5. Pembahasan

a. Pengaruh *Personal Background* terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berarti bahwa rendah atau tingginya *personal background* yang dimiliki oleh anggota DPRD belum berperan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena tingkat pendidikan dari anggota DPRD yang ada di Kota dan Kabupaten Magelang tidak mendukung dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD hanya sebagai formalitas ([Mandacan et al., 2018](#)).

Teori keagenan menyatakan bahwa anggota DPRD yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi atau mendukung setiap individu dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas keuangan daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut karena dari hasil menunjukkan bahwa *personal background* tidak berpengaruh dalam pengawasan keuangan daerah. Indikasinya adalah karena tingkat pendidikan yang dimiliki anggota DPRD dari berbagai tingkatan baik dari lulusan SMA hingga Doktoral hanya sebagai formalitas dan syarat saat yang harus dipenuhi ketika pencalonan, pada DPRD tidak ada tingkatan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, hal ini dibuktikan bahwa ada anggota DPRD yang mempunyai tingkat pendidikan SMA tetapi menjabat sebagai ketua. Seluruh anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan [Setiawan & Suryandari \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berbeda atau tidak sejalan dengan penelitian oleh [Mandacan et al., \(2018\)](#) dan [Ronsumbre et al., \(2019\)](#) yang menunjukkan bahwa *personal background* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

b. Pengaruh *political background* terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya, *political background* anggota DPRD yang tinggi dapat meningkatkan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini

disebabkan karena partai politik memberikan pengalaman bagi anggota DPRD dan pengalaman dari dunia partai politik menjadikan lebih bijaksana, *political background* ini dapat memotivasi dalam melaksanakan tugas dan memiliki pengetahuan untuk digunakan dengan baik dan positif (Arianti, 2017). Semakin banyak pengalamannya di partai politik menjadi media pembelajaran dengan mendapatkan pelatihan dan banyak arahan mengenai anggaran dari partainya maka akan meningkat dalam pengawasan keuangan daerah (Setiawan & Suryandari, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik *political background* maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, pengalaman dalam dunia politik akan mempunyai pengalaman dan tahu bagaimana cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD terutama dalam pengawasan keuangan daerah. Seseorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam dunia politik dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas maka akan menghasilkan pengawasan keuangan daerah yang baik dan terarah sesuai tujuan pemerintah yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arianti (2017), Hapsari (2018), dan Juanda & Balqisa (2019) menunjukkan bahwa *Political Background* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berbeda atau tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ronsumbre *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh negatif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

c. Pengaruh pengetahuan anggaran terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berarti bahwa rendah atau tingginya pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota DPRD belum berperan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini terjadi karena anggota DPRD Kabupaten dan Kota Magelang dalam rutinitas kerja dan pengalaman kerja anggota DPRD tidak menjadikan media pembelajaran dan tidak efektif dalam pengawasan keuangan daerah (Ronsumbre *et al.*, 2019).

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa anggota DPRD yang memiliki tingkat pengetahuan anggaran tinggi dapat mempengaruhi dalam pengawas keuangan daerah. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan pengetahuan anggaran tidak berpengaruh dalam pengawasan keuangan daerah. hal ini terjadi karena rutinitas kerja dan pengalaman kerja anggota DPRD tidak menjadikan media pembelajaran dan tidak efektif dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dilihat bahwa setiap tahun anggaran keuangan daerah yang disusun dengan nominal, kegiatan dan rutinitas yang berbeda oleh karena itu tidak efektif dalam pembelajaran anggaran, anggota DPRD memerlukan pembelajaran anggaran yang terbaru agar lebih mengetahui anggaran yang ada ditahun berjalan dan dapat mengidentifikasi penyimpangan dalam keuangan daerah sehingga kasus penyimpangan tidak terjadi lagi.

Penelitian ini sejalan dengan Arianti (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berbeda atau tidak sejalan yang dilakukan oleh Karubaba (2017), Hapsari

(2018), Mandacan *et al.*, (2018), Ronsumbre *et al.*, (2019), Harahap *et al.*, (2021) dan Tondang & Robin (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

d. Pengaruh akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Artinya bahwa semakin tinggi akuntabilitas anggota DPRD maka dapat meningkatkan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas keuangan daerah harus memberikan pertanggungjawaban dengan melaporkan semua kegiatan dan aktivitas berhubungan dengan keuangan daerah yang sejujurnya dan apa adanya agar dalam mengawasi kinerja pemerintahan daerah dengan rinci teliti sehingga dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang berhasil dan baik, mencegah adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Hapsari, 2018).

Dewan sebagai anggota legislatif sudah seharusnya mengerti dan memahami standar operasional prosedur akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah. Dimulai dari tahapan penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban dari APBD salah satunya melihat dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran berikutnya. Selain itu juga dijadikan umpan balik bagi eksekutif sebagai alat untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang (Hapsari, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka akan meningkatkan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkat dan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dari anggota DPRD, semakin tinggi pula tingkat pengawasan keuangan daerah. Terbentuknya akuntabilitas anggota DPRD yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri anggota DPRD seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dalam mengawasi dan mengontrol keuangan daerah sehingga dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang berhasil, baik dan mencegah adanya tindakan penyalahgunaan anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan Hapsari (2018), Harahap *et al.*, (2021), Tondang & Robin (2022) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berbeda atau tidak sejalan yang dilakukan Karubaba (2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap peran anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *political background* dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara *personal*

background dan pengetahuan anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan dua objek penelitian pada DPRD Kabupaten dan Kota, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisasikan ke semua objek mengenai peran anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada penelitian ini terbatas pada *personal background*, *political background*, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian dan menambah variabel seperti variabel pemahaman regulasi Cipta *et al.*, (2020), pemahaman dan pengetahuan Sistem Pengelolaan Keuangan bagi anggota DPRD (Yusra, 2018), dan variabel lainnya yang diperkirakan juga akan dapat mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Referensi

- Annur, C. M. 2021. ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester I 2021. (online), databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>.
- Arianti, E. 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan). *JOM Fekom, Volume IV*, No 1; 1297-1309.
- Cipta, S. D., Ammar, Z., & Andriani, R. 2020. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Latar Belakang Individu, Latar Belakang Politik Dan Pemahaman Regulasi Anggota DPRD Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, (2)(2), 51-64.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Apbd Dengan Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, Dan Political Background Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Ekonomi, Volume I*.
- Harahap, R., Muda, I., & Yahya, I. 2021. Factors Affecting The Performance Of Regional House Of Representatives Members In Regional Financial Supervision With Work Commitments As Moderating Variables Empirical Study In The Regional House Of Representatives Office Of South Labuhan Batu Regency. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance, Volume IV*, NO I; 1-13.
- Jateng.bpk.go.id. 2020. *Oknum PNS Pemkab Magelang Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Aset Senilai Rp 2 Miliar Lebih*. (Online), (Jateng.Bpk.Go.Id), Diakses 20 Maret 2022).

Jateng.bpk.go.id

- Jateng.bpk.go.id. 2021. *Dua Pegawai DLH Kabupaten Magelang Jadi Tersangka Kasus Dana Operasional BBM Mobil Sampah*. (Online), (Jateng.Bpk.Go.Id), Diakses 20 Maret 2022).
Jateng.bpk.go.id
- Juanda, J. & Balqisa, C. P. 2019. Analysis of Factors Affecting the Capability of the DPRK Board Members in Financial Supervision (Study on Banda Aceh Local Parliament (DPRK Banda Aceh)). *Research Journal of Finance and Accounting, Volume X*, No VIII; 181-189.
- Karubaba, C, J. 2017. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Nabire. In *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Mandacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Riset Akuntansi, Volume XII*, No III; 98-107.
- Pramita, Y. D., & Andriyani, L. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2*, 1–21.
- Ronsumbre, M., Werimon, S., & Sudarwadi, H. 2019. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal of Fiscal and Regional Economy Studies, Volume II*, No I; 58-68.
- Setiawan, F, & Suryandari, D. 2019. Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Organisasi, Jabatan Partai Politik, Budaya Politik, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal, Volume VII*, NO I.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Pressindo. Untuk Penelitian Yang Bersifat: CNN Indonesia, 2017. Program Keluarga Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Harapan Diklaim Efektif Tekan Konstruktif. Alfabeta. Bandung
- Tondang, R. & Robin, R. 2022. pengaruh Pengetahuan Dewan Dan Akuntabilitas Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Studi Pada Dprd Provinsi Kepulauan Riau. *Open Journal Systems, Volume XVI*, 7059–7068.
- Yusra, M. 2018. Pengaruh Personal Blackground, Political Culture dan Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Bireuen. *Jurnal Visioner & Strategis, 7(2)*, 35–42.